

**KONSEP KEPEMIMPINAN NEGARA YANG IDEAL
MENURUT IBNU TAIMIYAH**



SKRIPSI

**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH
M. RISNO
01370889**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**
- 2. DRS. M. RIZAL QOSIM, M. SI**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**KONSEP KEPEMIMPINAN NEGARA YANG IDEAL
MENURUT IBNU TAIMIYAH
Yang Disusun Oleh:**

**RISNO
NIM: 0137 0889**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, Tanggal 03 Februari 2007M/22 Safar 1427H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 08 Rabi'ul Awwal 1427H
27 Maret 2006 M



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D
NIP: 150240524

Sekretaris Sidang

Dr. Yudian Wahyudi, MA. Ph. D
NIP: 150240524

Pembimbing I

DRS. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150260055

Pembimbing II

Drs. M. Rizal Qosim, M. Si
NIP: 150256649

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150260055

Penguji II,

Agus Muh. Najib, M. Ag
NIP: 150275462

Dosen Fakultas Syari'ah
DRS. M. RIZAL QOSIM, M. SI
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
RISNO

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : RISNO
N.I.M : 01370889
Judul : KONSEP KEPEMIMPINAN NEGARA YANG IDEAL
MENURUT IBNU TAIMIYAH

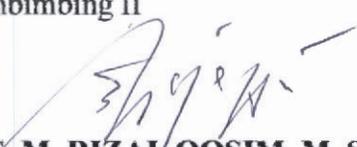
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Dzul Qa'dah 1427H
07 Desember 2006 M

Pembimbing II


DRS. M. RIZAL QOSIM, M. SI
NIP: 150256649

DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

RISNO

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : RISNO

N.I.M : 0137 0961

Judul : KONSEP KEPEMIMPINAN NEGARA YANG IDEAL
MENURUT IBNU TAIMIYAH

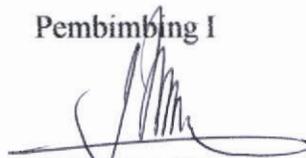
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Dzul Qa'dah 1427H
07 Desember 2006 M

Pembimbing I



DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM

NIP: 150260055

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ❖ Ayah dan Bunda tercinta, dengan cucuran keringat dan air matanya mengajarkan arti kehidupan kepada penyusun. Tak pernah kering sajadahmu di saat berdoa untukku dalam shalat malam, dalam shalat fardumu, tak pernah hilang kasih dan sayangmu dalam mendidik putra-putrimu. Engkaulah yang kukasihi, engkaulah yang kurindu, kuharap selalu doamu wahai Ayah Bundaku. Tanpa doamu tak kan kuraih, tanpa ridlamu tak kan kuraih segala cita yang kuinginkan.
- ❖ Kakak-kakkku dan Adik-adikku tercinta yang senantiasa mensupport penyusun dan memberi warna dalam menyusuri lorong-lorong kehidupan.
- ❖ Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Keluarga besar Pondok Psantren Nurul Islam Krang Cempaka Bluto Sumenep Madura.
- ❖ Sahabat- sahabat tercinta di Pondok Zakera, Resimen Mahasiswa, Temen-temen di Institut Karate-Do Cabang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Buat seseorang yang telah mewarnai dan memberikan support bagi perjalanan hidup penyusun

MOTTO

ان الله يأمركم ان تؤدوا الآمنات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
ان الله نعماء يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya Allah menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

(an-Nisa' [5] : 58)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد .

Segala puji dihaturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Karena dengan pertolongan, petunjuk dan bimbingannya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selayaknya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar baginda Muhamad SAW, keluarga dan pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini bukan karena kemampuan pribadi semata, melainkan berkat bantuan, pengarahan, bimbingan dan beberapa sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak, baik langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa mengucapkan ribuan terimakasih kepada.

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.
2. Almarhumah Nur' Ainy A.M. SH. M.H. selaku penasihat akademik yang selalu dan terus-menerus memberikan arahan kepada penyusun selama proses kegiatan akademik.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat M.Hum. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku pembimbing II, atas bimbingannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu kepada penyusun.

6. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda yang telah memberikan segalanya baik moril maupun materiil kepada penyusun. Dan juga buat seseorang yang telah mewarnai dan memberikan suport bagi perjalanan hidup penyusun.
7. Keluarga Besar Jinayah Siyash UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan sekaligus telah mendewasakan cara berfikir penyusun.
8. Dan temanku yang selalu setia memberikan motifasi dan tempat sering curhat bersama tidak lupa buat, Fathor Rahman STHi, A. Junaidi HS, SHi, Moh. Faruq (Mico) Dedy Jubaidy SH.i, Ailis Safitri, SH.i dan teman-teman yang masih banyak yang tidak mungkin cukup untuk disebutkan disini.
9. Kawan-kawan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan teman-teman kost, temen main dan jalan-jalan, dan taklupa kami ucapkan terimakasih buat temenku yang di Wisma Zakera yang telah menampung kami yang terkena dampak bencana 27 Mei 2006.
10. Kawan-kawan INKAI (Institut Karate-DO Indonesia) pada umumnya dan Cabang Jogja pada khususnya salam KARATEKA OSH.....!
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua, penyusun tidak dapat memberikan balasan apapun kecuali untaian do'a supaya Alloh selalu mempermudah hidupnya, semoga amal dan jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 07 Desember 2006

Penyusun,



RISNO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
ABSTRAK	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG	
KEPEMIMPINAN NEGARA	21
A. Pengertian Kepemimpinan Negara	21
B. Sistem Kepemimpinan Negara	28
C. Kriteria Kepemimpinan Negara	35
BABIII: BIOGRAFI DAN KONSEP KEPEMIMPINAN NEGARA	
YANG IDAL MENURUT IBNU TAIMIYAH	39
A. Kelahiran dan masa perkembangan Ibnu Taimiyah	39
B. Latar Belakang Pemikiran Ibnu Taimiyah	49
C. Kondisi Sosio Politik pada masa Ibnu Taimiyah	57
D. Pokok-Pokok Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Kepemimpinan Negara	63

E. Konsep Kepemimpinan Negara yang ideal	
menurut Ibnu Taimiyah	65
1. Konsep Kepemimpinan Negara	65
a. Tujuan Mendirikan Lembaga Kepemimpinan	68
b. Kualifikasi dan Cara Mengangkat Pemimpin	74
2. Kriteria Kepemimpinan Negara	75
3. Bentuk Kepemimpinan Negara	79

BAB: IV ANALISA PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH

MENGENAI KEPEMIMPINAN NEGARA	85
A. Bagaimana Konsep Kepemimpinan Negara	
yang Ideal menurut Ibnu Taimiyah	85
B. Relevansinya dengan Kepemimpinan Negara	
di Indonesia saat ini	99

BAB: V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran- saran	110

DAFTAR PUSTAKA	112
-----------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN	I
------------------------------	----------

❖ TERJEMAHAN	I
--------------------	---

❖ BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA HUKUM	III
--	-----

❖ <i>CURRICULUM VITAE</i>	IV
---------------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	ṣā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
 سئل -su'ila ذكر - žukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ا	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb
لِللَّهِ الْأُمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

KONSEP KEPEMIMPINAN NEGARA YANG IDEAL MENURUT IBNU TAIMIYAH

Persoalan negara dan pemerintahan dengan agama saat ini memang masih menjadi perbincangan yang menarik dan selalu aktual. Permasalahannya adalah, Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar umat manusia tidak menetapkan konsep secara implisit, bagaimana bentuk pemerintahan Islam yang sebenarnya. Alasannya barangkali sulit untuk di cari jawabannya, *pertama* al-Qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etika bagi manusia, al-Qur'an merupakan pedoman nilai-nilai kehidupan manusia. *Kedua*, sudah merupakan kenyataan bahwa institusi-institusi sosial politik dan organissi al-Qur'an memberikan jaminan yang sangat esensial dan menjaga terhadap kekuasaan hukum dan sosial politik.

Seiring dengan perkembangan pemikiran di kalangan umat Islam tentang pemerintahan, hadir sebuah pemikiran seorang tokoh mencoba menawarkan konsepsi pemerintahan yang ideal yakni konsep kepemimpinan negara yang ideal. Mengenai tentang kepemimpinan merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, karena kita tahu bahwa pemerintahan umat Islam sendiri sangat beragam. Hal tersebut memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap permasalahan tentang perbedaan pandangan tentang konsep pemerintahan yang harus diikuti oleh umat Islam.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian sejarah, maka pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosio-historis, yaitu pendekatan terhadap teks al-Qur'an dan sunnah secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi serta menverifikasi bukti-bukti untuk menegaskan fakta-fakta. Dan pendekatan yang menggambarkan tentang proses terjadinya suatu prilaku (pemikiran) sekaligus sudut posisi manusia yang membawanya pada proses prilaku (pemikiran) tersebut.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa konsep kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyah adalah konsep masalah. Hal ini terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap pengamalan ajaran Islam, juga dikarenakan kondisi sosial, historis yang berbeda yang di dorong oleh pengalaman sejarah masa lalu pemerintahan Islam, sehingga memberikan interpretasi yang berbeda tentang konsep kepemimpinan yang harus di ikuti dan di jalankan oleh umat Islam. Untuk konteks Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dengan beragam etnis, bahasa, agama, kondisi geografis dan lain-lain, penetapan konsep dan sistem pemerintahan yang di jalankan harus dapat mengakomodir pluralitas tersebut. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam yang menjadikan syari'at Islam sebagai pilar dan pondasi bagi setiap prilaku pribadi dan masyarakat berdasarkan konseptual nash dan konbtekstual kondisi sosial dan kehidupan yang dijalani sekarang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya orang berpendapat bahwa makhluk yang terpenting di alam adalah manusia, karena manusia merupakan makhluk yang oleh Tuhan diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Manusia diamanati oleh Allah menjadi pemimpin di atas muka bumi ini (*khafifah fil arq*)¹. Kesempurnaan ciptaan yang disertai harkat dan martabat tersebut dalam pemikiran yang bukan bersifat keagamaan disebut sebagai hak asasi manusia, hak dasar yang dibawa bersama dengan kelahirannya ke dunia ini.² Di lain pihak merupakan pandangan keagamaan harkat dan martabat yang telah ada dalam diri manusia itu bukanlah sesuatu yang telah ada dalam diri manusia sejak lahir, tetapi datang kemudian sebagai pemberian Allah.

Di balik keistimewaan manusia di atas, kenyataan membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Hal ini bisa dilihat dari kenyataan: pertama dari segi pemenuhan kebutuhan pokok, kedua dari segi pertahanan diri dari segala ancaman bahaya. Kedua hal ini tidak mungkin bisa tanpa adanya orang lain secara gotong royong dengan sesamanya. Manusia terdorong untuk hidup berlawanan dan hidup bersama³ Menurut Ibnu Khaldun hidup bersama dan tolong-menolong merupakan

¹ Al-Qur'an, *Surat al-Baqarah* (2) : 30.

² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 120.

³ *Ibid*, hlm 33.

kebutuhan pokok manusia karena apabila itu tidak dilaksanakan, jenis manusia ini akan punah. Dengan demikian kehidupan memerlukan adanya pemimpin yang bisa memimpin manusia dalam kehidupan di dalam masyarakat. Oleh karena itu kepemimpinan di dalam masyarakat harus ada.

Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Dalam istilah fiqih kepemimpinan dikenal dengan istilah khilafah, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab pada urusan agama dan urusan dunia⁴. Hal ini sesuai dengan yang dirumuskan oleh al-Māwardī bahwa: Imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian guna melindungi dan mengatur dunia. Istilah Imamah berasal dari perintah agama lewat ijma' (konsensus). istilah *imāmah* hanya mungkin bila konsep taat melekat pada institusi itu, dasar yang dikemukakan adalah al-Qur'an Surat an-Nisā' yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن

تأويلا

Ayat ini terdapat perintah Tuhan untuk selalu mentaati Allah, Rasulullah dan pemimpin. Dengan ayat ini disimpulkan oleh al-Māwardī

⁴ Yusuf Musa & Nizham, *Politik dan Negara dalam Islam*, terj. M. Thalib (Surabaya: 1990), hlm.19.

bahwa taat kepada pemimpin itu merupakan kewajiban agama. Dengan kata lain ada kaitan antara agama dan kepemimpinan.⁵

Kata *Khilāfah* analog dengan istilah *Imāmah* yang berarti keimaman, keamiran pemerintahan. Begitu pula dengan kata *Imārah* yang berarti keamiran, pemerintahan.⁶

Kepemimpinan negara merupakan masalah yang sering menimbulkan banyak perdebatan, baik di kalangan masyarakat yang semakin kritis pada umumnya dan di kalangan para pakar politik pada khususnya. Seorang penulis sejarah Islam, asy-Syahrutsānī, dalam *Al-Milal wa an-Nihāl*, sebagaimana yang dikutip Jalaluddin Rahmat menyebutkan:

Pertentangan yang paling besar di kalangan umat adalah pertentangan imamah. Karena, pada setiap zaman, tidak pernah pedang dihunus dalam Islam karena aqidah Islamiyah sesering seperti pedang itu dihunus karena mempertentangkan *imāmah*.⁷

Masalah kepemimpinan selalu menjadi masalah yang paling vital dan strategis dalam membangun sebuah negara maupun sebuah bangsa. Kepemimpinan negara menjadi masalah yang sangat penting, karena apabila suatu negara dan bangsa mampu memilih kepemimpinan yang jitu, kreatif dan prospektif maka bangsa dan negara itu dapat menikmati masa depannya. Negara atau bangsa tidak beruntung apabila kepemimpinan yang dimilikinya

⁵ *An-Nisā*, (4) : 59

⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm.44

⁷ Jalaluddin Rahmat, "Islam di Indonesia: Masalah Definisi" dalam M. Amien Rais (ed), *Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm.57.

tidak mencerminkan (memiliki) kualitas yang bagus dan kehilangan visi serta kreativitas.⁸

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga menjamin berlakunya perintah dan hukum Allah. Ibnu Taimiyah juga menganggap bahwa sultan atau kepala negara adalah bayangan Allah di muka bumi. Artinya dia adalah wakil Allah di muka bumi dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah yang bersumberkan dari Tuhan. Bahkan lebih jauh dari itu Ibnu Taimiyah berpendirian, keberadaan kepala negara meskipun zalim lebih baik bagi rakyat daripada kalau mereka harus hidup tanpa kepala Negara.⁹

Dia meminjam suatu ungkapan enam puluh tahun di bawah sultan yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa sultan. Pendapat Ibnu Taimiyah yang ekstrim itu mungkin merupakan pencerminan dari kekawatirannya terhadap kemungkinan terjadinya gangguan terhadap stabilitas politik di negara tempat dia hidup itu, yang masih sarat dengan kerawanan. Satu hal lagi yang cukup menarik lagi, Ibnu Taimiyah mendambakan ditegakkannya keadilan sedemikian kuat sehingga dia cenderung beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan menyetujui ungkapan

⁸ M. Amien Rais, *Sikap Kami*, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Anda, 1999), hlm. 115.

⁹ Jeje Abdul Rajak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1996), hlm. 163.

bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahkan Allah tidak mendukung negara yang tidak adil meskipun Islam.

Pemegang kekuasaan negara adalah pemimpin, maka keberadaan seorang pemimpin bagi suatu kelompok masyarakat sangat penting artinya, oleh karena pemimpinlah yang sangat menentukan maju mundurnya kelompok masyarakat itu. Kalau suatu kelompok masyarakat mempunyai pemimpin-pemimpin yang baik, maka masyarakat akan cepat mengalami kemajuan. Sebaliknya, kalau kualitas kepemimpinan suatu masyarakat rendah, maka masyarakat itu sulit untuk mendapatkan kemajuan, juga mungkin akan mengalami kemunduran atau bahkan mungkin akan mengalami kehancuran.¹⁰

Islam tidak mempunyai prefensi tentang sistem dan metode pergantian kepemimpinan, tetapi Islam memberikan prinsip umum dalam mengelola dan mengatur jalannya pemerintahan dalam penyelenggaraan mekanisme sistem pemerintahan negara. Al-Qur'an memberikan empat prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dapat dikatakan sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik. Keempat asas tersebut adalah: 1) asas amanat; 2) asas keadilan; 3) asas ketaatan (disiplin); dan 4) asas musyawarah dengan referensi al-Qur'an dan as-Sunnah.¹¹

Sistem kepemimpinan negara, sepanjang rentang sejarah, sering mengalami kerapuhan. Persoalan ini perlu dianalisis untuk mengetahui di mana

¹⁰ Syukriyanto A.R, (ed.), *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah*, Cet. I (Yogyakarta: SI Press, 1990), hlm. 147.

¹¹ Abd. Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 306-307.

sebenarnya letak titik lumpuhnya sistem kepemimpinan yang dari masa kemasa yang belum membuahkan hasil berupa keselamatan dan kesejahteraan umat.¹²

Kerapuhan sistem kepemimpinan sedikit banyak dipengaruhi adanya krisis kepemimpinan. Seperti diketahui banyak orang, krisis kepemimpinan disebabkan karena makin langkanya kepedulian pada kepentingan orang banyak dan kepentingan lingkungan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat tiga masalah mendasar yang menandai kurangnya itu. Pertama, adanya krisis komitmen. Kedua, adanya krisis kredibilitas. Ketiga, masalah kebangsaan serta kehidupan bermasyarakat sekarang ini tantangannya semakin bertambah kompleks dan rumit. Kepemimpinan tidak cukup bisa mengandalkan bakat dan keturunan.¹³

Ibnu Taimiyah berpendapat, hendaknya dipilih orang yang paling sesuai untuk menempati posisi kepemimpinan. Sesungguhnya untuk menempati sebuah posisi (kedudukan) dalam kepemimpinan hendaknya harus memenuhi dua kriteria berikut, yaitu *quwwah* (otoritas) dan *amanah* (jujur dan dapat dipercaya).¹⁴

Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah membentuk kepemimpinan menjadi wajib hukumnya, Hal itu semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan dan harmoni dalam masyarakat. Karena demikian pentingnya masalah kepemimpinan, maka Rasulullah bersabda :

¹² A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 126.

¹³ Soejibto Wirosardjono, *Dialog dengan Kekuasaan*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 126.

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik*, alih bahasa Rafi' Munawar, cet. ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 11-12.

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم (رواه أبو داود)

Semua orang mengakui semua tata aturan yang Rasulullah saw. tegakkan bersama-sama para mukmin di Madinah, apabila ditinjau dari segi kenyataan dan dibandingkan dengan ukuran-ukuran politik pada masa modern ini, dapatlah dikatakan bahwa tata aturan itu merupakan tata aturan politik. Dalam pada itu, tidak ada hubungan untuk dinyatakan bahwa aturan itu berciri keagamaan, yaitu apabila dilihat kepada tujuan-tujuannya dan penggerak-penggerakannya. Kalau demikian, dapatlah dikatakan bahwa tata aturan Islam itu adalah tata aturan yang bersifat politik dan bersifat agama.

Dalam teori, Negara Islam merupakan negara Allah, dan kaum Muslimin merupakan partainya (*hizbullah*) hal ini berdasarkan konsep kebahagiaan (*falāh*): (1) harus berusaha untuk keberhasilan masyarakat Muslim di dunia ini serta mempersiapkannya untuk keberhasilan di akhirat; (2) untuk menyadari tujuan-tujuan tersebut, masyarakat Muslim (*ummah*) harus berdasarkan prinsip-prinsip persamaan hak, solidaritas, dan kemerdekaan.

Secara tradisional, para faqih menekankan tiga ciri penting sebuah negara Islam: masyarakat Muslim (*Ummah*), hukum Islam (*Syari'ah*), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (*Khalifah*). Karena kekuasaan mutlak atau kedaulatan puncak ada pada Allah, maka negara Islam harus menjunjung tinggi keunggulan hukum Islam; selanjutnya, karena masyarakat Muslim harus diperintah menurut hukum Islam, maka harus mempunyai pemimpin untuk melaksanakan atau menjalankannya.

Maka seluruh umat Islam setelah Rasulullah saw. wafat sepakat dan wajib adanya lembaga kekhalifahan ini. Seorang khalifah harus ada sebagai pengganti Rasulullah saw. dalam mengawasi kepentingan umat dalam hidup beragama. Seterusnya kaum muslimin mengikuti jejak yang telah dimulai semenjak berpulangnya Rasulullah ke rahmatullah.

Dari paparan di atas, jelas terlihat bahwa Ibnu Taimiyah cukup menempatkan masalah kepemimpinan sebagai persoalan yang sangat penting dalam kehidupan. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa di sisi lain, ia justru mengkritik teori kekhalifahan, dan memandang tidak perlunya kekhalifahan sama sekali. Ia meragukan validitas pendapat bahwa kekhalifahan berasal dari al-Qur'an dan Sunnah atau bahkan latar belakang sejarah Khulafa ar-Rasyidun yang dianggapnya tak lebih dari sekedar peristiwa sejarah. Praktek Nabi sendiri oleh Ibnu Taimiyah tidak dipandang sebagai dasar pijak untuk "mengadopsi" bentuk pemerintahan tertentu. Menurut pendapatnya, rezim nabi merupakan sebuah lembaga yang *sui-generis* (apa adanya) dan oleh karenanya tidak dapat berperan sebagai dasar pijak teori politik dalam Islam. Begitu juga lembaga pemerintahan pada masa Khulafaur-Rasyidin¹⁵

Pertama sekali Ibnu Taimiyah mempelajari tata sosial yang berada di bawah pimpinan Nabi dan ia tidak mau menyebut tata sosial itu sebagai negara (Imamah). Menurutnya, memang benar bahwa di dalam setiap persoalan Nabi Muhammad ditaati oleh anggota-anggota masyarakat, tetapi ia hanya ditaati

¹⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Mufid (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 39.

sebagai seorang Nabi, bukan sebagai kepala negara. Muhammad mengeluarkan keputusan-keputusan yudisial, mengumpulkan pajak, mencetuskan perang, membuat pakta-pakta perdamaian, dan menggalang hubungan-hubungan internasional, tetapi semua itu dilakukannya semata-mata sebagai seorang Nabi. Prestasi-prestasi itu bukanlah kondisi bagi kenabiannya itu, baik sebelum memiliki kekuatan maupun sesudah menjadi pemimpin sebuah masyarakat yang kuat, ia ditaati dengan ketaatan yang sama. Ia ditaati ketika ia sendirian dan akan ditaati terus oleh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semua ini bukanlah atribut-atribut dari kedaulatan politik yang merupakan landasan negara. Selanjutnya ia tidak dipilih dan diangkat rakyat untuk memegang kekuasaan itu, dan iapun tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mereka.

Dengan perkataan lain, apabila mengenai Muhammad dipergunakan istilah kedaulatan, maka harus disadari bahwa kedaulatan tersebut tidak diterimanya karena disetujui atau dikehendaki rakyat. Kedaulatan tersebut diterimanya dari Allah. Terakhir sekali perlu diketahui bahwa al-Qur'an yang sering menjelaskan tujuan-tujuan dan obyek-obyek dari kenabian Muhammad tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa menegakkan otoritas politik adalah salah satu di antara tugas-tugasnya.

Dari semua ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa teori konstitusional Islam tidak dapat dibuat berdasarkan tindakan-tindakan politis yang pernah dilakukan Nabi. Ibnu Taimiyah tidak menyangkal adanya otoritas politik di dalam rezim Nabi. Yang hendak dikemukakannya adalah bahwa rezim Nabi

adalah suatu institusi yang *sui-generis* (unik) dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan di dalam membuat sebuah teori politik Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisa beberapa pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai konsep kepemimpinan negara yang sebenarnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep kepemimpinan negara yang ideal menurut Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana relevansinya dengan kepemimpinan negara di Indonesia saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Melihat rumusan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep Ibnu Taimiyah mengenai kepemimpinan negara.

Dan diharapkan setelah paripurnanya penelitian ini, hasilnya akan bermanfaat, antara lain:

1. Sebagai khazanah keputustakaan bagi para peminat studi tentang politik Islam, khususnya tentang kepemimpinan negara.
2. Sebagai bahan kajian terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah secara lebih spesifik, yaitu tentang kepemimpinan negara.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan kepemimpinan negara dalam Islam merupakan topik yang sering dibahas dari zaman Rasul sampai pada masa sekarang, karena kepemimpinan sendiri masalah yang belum ada ketentuan atau aturan yang pasti, sehingga masalah kepemimpinan negara semakin ramai diperbincangkan. Masalah ini menjadi lebih menarik jika diselaraskan dengan pemikiran tokoh, karena dengan demikian akan menjadi sebuah permasalahan.

Maka sebagai tokoh yang kontroversial gagasan dan pemikiran Ibnu Taimiyah sangat menarik sekali untuk dikaji. Sudah banyak karya ilmiah yang lahir dari intelektual dalam dan luar negeri yang membahas Ibnu Taimiyah dari berbagai perspektif, namun dari berbagai karya ilmiah tersebut belum dijumpai adanya penelitian khusus yang membahas tentang konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Berikut ada beberapa buku yang membahas pemikiran Ibnu Taimiyah yang membuktikan keorisinilan skripsi ini di antaranya:

As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah, sebuah risalah kecil setebal 80 halaman yang membahas mengenai tugas dan kewajiban pemimpin dan rakyat, memenuhi amanah, realisasi dan pembagian zakat, pelaksanaan keadilan dan *hudud* (hukuman-hukuman terhadap kejahatan-kejahatan di dalam al-Qur'an).¹⁶

¹⁶Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1409 H/1988 M), hlm.13-20.

Hidayat Nur Wahid, dalam bukunya *Siyasah Syar'iyah*, sesungguhnya merupakan dakwah manhajiyah yang berbalik dari hukum buatan manusia menuju pada hukum transendental ciptaan Allah swt. Yang didalamnya berisikan pula rincian dan hak-hak dan kewajiban pemimpin dan umat yang dipimpinnya, yang sepenuhnya bersandar pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.¹⁷

Pemikiran Ibnu Taimiyah di antaranya diteliti oleh Munawir Sjadzali, yang berjudul *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* yang membicarakan isi kitab karangan Ibnu Taimiyah, *as- Siyasah as- Syar'iyah*, yang terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama menguraikan tentang penyampaian amanat kepada yang berhak, khususnya tentang penunjukan dan pengangkatan kepala negara, pengelolaan harta benda dan kekayaan rakyat. Bagian kedua membahas tentang pelaksanaan hukum-hukum pidana hak Tuhan dan hak sesama manusia.¹⁸

Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh Jeje Abdul Rojak, yang berjudul *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* adalah hasil terjemahan *as- Siyasah as- Syar'iyah* Ibnu Taimiyah. Yang isinya merupakan format politik atau bernegara yang digali oleh tokoh-tokoh pemikir muslim. Begitu juga buku ini menggambarkan bagaimana

¹⁷ M. Hidayat Nur Wahid, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti,, 1995), hlm. 17

¹⁸ Munawir Sjadzali *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (UI Press, 1990), hlm. 79

pemaknaan berpolitik yang di landasi oleh nilai-nilai relijiusitas¹⁹ Begitu juga dengan buku yang ditulis oleh Khalid Ibrahim Jindan *Teori Politik Islam (Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam)* buku ini menjelaskan tentang sebuah pandangan tentang perkembangan, pemikiran politik Islam sejak masa kelahirannya sampai dengan pertengahan abad 13. menyusul kemudian pembahasan mengenai metodologi Ibnu Taimiyah, berbagai reformasi dan kaitannya dengan teori politik.²⁰ Dan Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh: Qamaruddin Khan, Buku ini menyajikan pertumbuhan dan perumusan gagasan dan teori politik Islam sebagai latar belakang yang di harapkan dapat membuka dan menembus selubung kebingungan teori politik Islam yang di Ikami oleh para pemikir dan penulis politik Islam, terutama pada masa sekarang²¹

Selain buku-buku di atas, beberapa pikiran dan pendapatnya yang tersebar diberbagai media massa juga digunakan untuk membantu ketajaman analisis penelitian ini. Selain itu beberapa buku yang membahas atau menyinggung tentang kepemimpinan negara dan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah juga dapat dijadikan rujukan guna mempertajam dan memperjelas analisis

¹⁹ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu taimiyah*, (Surabaya, Bina Ilmu. 1999), hlm. 166

²⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam (Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam) (PT. Rineka Cipta, Jakarta anggota IKAI 1994), hlm. 25*

²¹ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah (Penerbit Pustaka, Bandung, 1415 H –1995 M)*, hlm. 41

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh tatanan hidup manusia. Al-Qur'an dan Hadits diyakini sebagai pegangan dalam memecahkan persoalan, terutama mengenai kepemimpinan dalam pemerintahan sebuah negara. Dalam bahasa Arab, pemimpin adalah imam atau khalifah. Dalam hadits dikatakan kita semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang kita pimpin. Al-Qur'an juga menganjurkan kepada umat Islam untuk taat kepada pemimpin.

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في

شيء فرده الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر²²

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa kepemimpinan negara adalah sebuah lembaga yang memegang kendali suatu negara, sehingga pemimpin diharapkan mampu melaksanakan amanah yang telah dipikul, sebagaimana firman Allah dalam surat Sad (38) : 26 sebagai berikut :

يداود انا جعلتك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى

فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد

بما نسوا يوم الحساب

Dari ayat di atas dapat diambil makna, bahwa seorang penguasa (pemimpin) harus melaksanakan keadilan, kejujuran serta kedamaian terhadap

²² An -Nisa' (04) : 59

negara yang dipimpinnya. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab, baik terhadap umat (warga negara) yang dipimpinnya maupun kepada Allah yang mempunyai alam semesta ini.²³

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut: "Ibnu Umar berkata, saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu kelak akan ditanyakan kepemimpinanmu terhadap rakyat, seorang kepala negara atau pemerintahan adalah pemimpin yang akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan bertanggungjawab atas pimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di keluarganya dan bertanggungjawab atas anak-anaknya. Pelayan atau buruh pemimpin kekayaan majikannya akan ditanyai tentang pemeliharaannya. Maka kamu sekalian sebagai pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya."²⁴

Para ulama Islam telah sepakat bahwa kepemimpinan atau khilafah merupakan salah satu kewajiban di antara dasar agama dan merupakan kewajiban yang sangat penting. Lantaran kepemimpinan berkaitan dengan pelaksanaan seluruh syari'at dan realisasi kemaslahatan umat (rakyat).²⁵ Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah bahwa membentuk *Imārah* (kepemimpinan) adalah kewajiban asasi dalam agama. Alasan yang

²³ A.M Saefuddin, *Ijtihad Politik*, hlm. 126

²⁴ Imam Muslim, Shahih Muslim, "*Kitab Imārah, Bab Faḍīlatu al-Aḥkām al-ʿĀdil wa' Uqūbah al-Jai'ir wa al-Has 'Ala ar-Rāfiq bi ar-Riyah wa an-Nahi an-Adkhadi al-Masyaqqati* (Beirut: Dar al-Fikr t.t), hlm. 11-125.

²⁵ Dhiya ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah: Kritik terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 250.

dikemukakan adalah bahwa upaya menegakkan agama dan mencapai kemaslahatan bagi segenap umat manusia, mustahil dapat direalisasikan tanpa adanya suatu perkumpulan (kepemimpinan) yang bersifat mengikat dan dapat memenuhi kebutuhan mereka.²⁶

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan manusia akan negara didasarkan pada akal dan hadits. Argumen rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerjasama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Argumen rasional itu juga diperkuat dengan landasan dari sunnah Nabi (hadits). Ia mengajukan sejumlah hadits Nabi yang menekankan perlunya kepemimpinan dan pemerintahan. Oleh karena itu membentuk kepemimpinan menjadi wajib hukumnya, hal ini adalah semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan dan harmoni dalam masyarakat. Karena demikian pentingnya masalah kepemimpinan, maka Rasulullah saw bersabda :

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمَرُوا أَحَدَهُمْ (روه أبو داود)

Dalam hal ini beliau juga meminjam ungkapan yang berbunyi:

*"Enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik dari satu malam tanpa ada kepemimpinan. Itulah dua contoh dari hadits-hadits yang dikemukakan."*²⁷

Dari paparan di atas, jelas terlihat bahwa Ibnu Taimiyah cukup menempatkan masalah kepemimpinan sebagai persoalan yang sangat penting

²⁶ Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah, *Etika Politik Islam*, alih bahasa Rafi' Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 156.

²⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Yogyakarta: Risalah Gusti, 1995), hlm. 46.

dengan cara mengumpulkan data, kemudian data yang sudah terkumpul disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.

3. Pengumpulan Data

Sebagai langkah awal dalam penulisan, penyusun berusaha mengumpulkan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan negara, dan khususnya pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap masalah tersebut, baik buku primer maupun buku sekunder. Selanjutnya penyusun membaca, menelaah dan menganalisa sejumlah literatur tersebut yang ada relevansinya dengan pembahasan ini

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan suatu pemahaman dan kesimpulan. Untuk analisis ini, penyusun menggunakan metode induktif, yaitu pola penalaran yang berangkat dari pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kepemimpinan negara untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

5. Pendekatan

Pendekatan Normatif

Pendekatan ini penyusun gunakan untuk mendekati masalah dalam skripsi ini dengan melihat kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma-norma yang telah berlaku, sebagai upaya pengkajian dalam menelaah permasalahan kepemimpinan negara menurut siyasah Islam (fiqih siyasah), sebagaimana disiplin ilmu yang penyusun tekuni. Di

samping itu pendekatan etis juga digunakan untuk melihat masalah yang berkaitan dengan moral dalam kepemimpinan.

G. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dipahami pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kepemimpinan negara secara detail. Untuk itu pembahasan skripsi ini dikemas dalam beberapa bab, antara lain:

Bab I pendahuluan: berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah: Latar belakang masalah yang mengedepankan akar persoalan yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema yang dimaksud, pokok masalah yang memuat permasalahan yang ingin dijawab. Tujuan dan kegunaan yang mencakup orientasi dan arah diadakannya penelitian, Telaah pustaka dan kerangka teoritik yang digunakan sebagai pedoman, dan arahan yang akan menjadi parameter dan sekaligus acuan dalam penelitian dan pada bagian akhir memuat sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

BAB II. dipaparkan gambaran umum tentang kepemimpinan negara, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: pengertian kepemimpinan negara, sistem kepemimpinan negara, yang terdiri dari sistem pemilihan pemimpin negara dan sistem kepemimpinan negara, dan kriteria kepemimpinan negara. Tujuannya supaya dapat diketahui gambaran umum tentang kepemimpinan negara secara keseluruhan.

BAB III. diuraikan tentang biografi Ibnu Taimiyah. Posisi Ibnu Taimiyah sebagai tokoh negarawan muslim, sumber pemikiran yang

mempengaruhi cara berfikirnya, serta konsep pemikirannya tentang tata negara Islam. Hal ini sangat penting dalam penelitian tentang pemikiran seorang tokoh, sebab ketika akan membahas dan menganalisis pemikiran tokoh tersebut harus mengetahui terlebih dahulu segala aspek yang berkaitan dengannya.

BAB IV merupakan bab analisis atau lebih dikerucutkan pada aplikasi dari konsep kepemimpinan negara yang ideal menurut Ibnu Taimiyah serta relevansinya dengan kepemimpinan negara di Indonesia saat ini yang berkaitan erat dengan deskripsi serta analisa pada bab II.

BAB V akan menguraikan kesimpulan dari keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil kesimpulan tersebut dapat memberi pengetahuan yang komprehensif bagi pembaca dalam mengkaji permasalahan tentang pola pelaksanaan pemerintahan dalam Islam. Di samping itu, penyusun juga memberikan saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Menurut Ibnu Taimiyah adalah merupakan masalah yang cukup vital sekali. Ia dimaksudkan sebagai sarana untuk melanjutkan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah sangat menekankan keharusan menegakkan negara untuk membela agama, karena ia benar-benar yakin bahwa tujuan Islam adalah menciptakan suatu tertib sosial di mana nilai-nilai dasar al-Qur'an dan as-Sunnah direalisasikan. Tata sosial seperti ini tidak dapat direalisasikan secara ideal tanpa negara. Itulah sebabnya mengapa Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa agama tidak mungkin hidup tanpa adanya negara. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kepemimpinan negara berawal dari pentingnya akan adanya sebuah kepemimpinan. Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah bahwa membentuk *imarah* (kepemimpinan) adalah kewajiban asasi dalam agama. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa upaya menegakkan agama dan mencapai kemaslahatan bagi segenap manusia mustahil dapat direalisasikan tanpa adanya suatu perkumpulan (kepemimpinan) yang bersifat mengikat dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mengkritik atau bahkan menolak sistem kekhalifahan hanya dalam kapasitasnya sebagai “teori” baku, dan bukan menolak sistem

kekhalfahan sebagai wujud kekhalfahan. Dan pemerintahan kekhalfahan tidak memiliki dasar konstitusional dari al-Qur'an, karena menurutnya walaupun al-Qur'an menjelaskan kebutuhan manusia terhadap pemerintahan dan kekuasaan, tetapi al-Qur'an tidak memaparkan secara rinci keputusan konstitusional pemerintahan Islam. Teori khilafah tidak ada dasar pijakan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, alasannya bahwa dalam teori Islam yang ada bukan khilafah tetapi hukum syari'at, namun perkembangan lembaga tersebut sebagai satu-satunya organisasi politik yang diterima dalam masyarakat justru menghantarkannya pada legitimasi tertentu dengan berbagai maksud yang tidak selalu segaris dengan ajaran pokok syari'at, kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya ditegaskan oleh hukum wahyu, tetapi juga diperkuat oleh hukum alam atau akal yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalankan kerja sama.

2. Konsep yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah dalam kepemimpinan Negara adalah konsep masalah. Di sini Ibnu Taimiyah sangat menekankan pentingnya menciptakan kemaslahatan ummat. Untuk menjabarkan pemikiran-pemikirannya itu, ia memberi landasan amanah dan keadilan yang menjadi asas setiap term ide kenegaraannya. Landasan amanah dan keadilan itu oleh Ibnu Taimiyah bukan saja sebagai landasan moral tapi harus terapkan dalam setiap praktik penyelenggaraan Negara. Relevansinya dengan masa sekarang adalah kita memang sedang mengalami krisis kepemimpinan serta memiliki budaya yang lamban.

Seperti budaya feodalistik di negeri ini masih terasa, yaitu menganggap pemimpin pemerintahan sebagai raja yang selalu benar, disembah keberadaannya dan diikuti korupsinya. Belum berorientasi pada prestasi, karena kelebihan bawahan selama ini oleh pemimpin pemerintahan di Indonesia dianggap saingan pada dirinya. Oleh karena itu perlu diantisipasi serta keinginan untuk melayani masyarakat masih rendah, yaitu untuk mempercepat kerja, mempermudah biaya dan mempertinggi mutu, karena masyarakat dianggap rakyat banyak yang awam. Oleh karenanya, konsep masalah di dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali untuk diterapkan di Indonesia demi menciptakan kemaslahatan umat. Akan tetapi persoalannya adalah apakah bangsa Indonesia sudah siap dengan penerapan dan pengakuan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan dengan kondisi bangsa Indonesia yang sangat heterogen, agama, ras, suku, bangsa. Oleh karenanya untuk konteks Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dengan beragam etnis, bahasa, agama, kondisi geografis dan lain-lain, penetapan konsep dan bentuk serta sistem pemerintahan yang di jalankan harus dapat mengakomodir pluralitas tersebut.

B. Saran-Saran

1. Di samping menyampaikan konsep masalah yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah di atas, mengenai konsep kepemimpinan negara dan penerapan landasan amanah dan keadilan dalam segala aspek kehidupan kepada umat Islam pada umumnya dan umat Islam Indonesia pada khususnya, pergerakan Ibnu Taimiyah hendaknya diiringi juga dengan keterlibatan

langsung program pengembangan bidang kehidupan yang lain seperti sosial, ekonomi, kebudayaan dan bidang kehidupan lainnya sehingga konsep masalah yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah tidak diasumsikan oleh rakyat Indonesia sebagai konsep yang menghegemoni politik semata. Bukannya masalah adalah sebuah konsep yang harus diterapkan untuk bisa memenuhi dan menciptakan kemaslahatan ummat. Karena kalau tidak, akan berakibat dapat membuka memori lama ummat Islam tentang pemahaman politik yang kejam dan senantiasa ambisius terhadap kekuasaan dan jabatan.

2. Pada prinsipnya kehadiran Ibnu Taimiyah, dalam hal ini adalah merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh umat Islam dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera di bawah naungan ridha Allah SWT. Oleh karena untuk mewujudkan hal itu setiap manusia ataupun sebagai kaum atau makhluk terbaik di antara yang lainnya, Islam tidak mengajarkan umatnya menjadi manusia yang apatis terhadap perkembangan yang ada, yang diajarkan Islam adalah bagaimana dengan adanya perbedaan yang ada menjadi suatu rahmat dari Allah SWT yang harus diaktualisasikan dengan proporsional dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dan rambu-rambu yang telah digariskan oleh nash.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Rifa'i, Mohammad, *Terjemah/Tafsir al-Qur'an*, Semarang: Wicaksana, 1993
Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Dipenogoro, 2004

B. Hadis

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim, "Kitab Imārah, Bab Faḍīlatu al-Aḥkām al-'Ādil wa' Uqūbah al-Jai'ir wa al-Has 'Ala ar-Rāfiq bi ar-Riyah wa an-Nahi an-Adkhadi al-Masyaqqati*, (Beirut: Dar al-Fikr t.t).

C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1397 H/1997 M.

Kutubi, Muhammad Ibn Syakir al-, *Fawat al-Wafayat*, Cairo 1951, volume I.

Mawardi al-, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, ttp: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1973.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, cet. I, Jakarta : Rajawali Press, Maret 1994

Salim, Abd. Mu'in, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dam al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Widodo, Amin, *Fiqh Siyasah dalam Sistem Kenegaraan*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset IKPI.

D. Ensiklopedi

Atsir, Ibnu al-, *Tarikh al-Kamil*, Cairo 1873.

Grousset, Rene, *Histoire des Croisades*, Paris, 1934.

Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

E. Kelompok Lain-Lain

- A.R, Syukriyanto, (ed.), *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah*, Cet. I Yogyakarta SI Press, 1990.
- Ahmad, Mumtaz, (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, alih bahasa Ena Hadi, Bandung, Mizan, 1993.
- Asy'ari, Fuad, *Masa Depan Umat Islam: Peluang dan Tantangan*, cet. ke-1, Bandung: al-Bayan, 1993.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar ilmu politik*, Jakarta, Gramedia, 1977.
- Budiharjo (ed), *Aneka Pemikiran tentang Kekuasaan dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Chaidar al-, *Pemilu 1999: Pertentangan Ideologi Partai-partai Islam Versus Partai-partai Sekuler*, cet. ke-1, Jakarta: Darul Falah, 1419 H.
- Ghazali al-, *At-Tibr al-Masbūk fi Naṣīhat al-Mulūk*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H./1988 M.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam: Menurut Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Mufid Jakarta PT Rineka Cipta, 1994
- , *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Yogyakarta: Risalah Gusti 5 Januari 1995
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimat*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Maududi, Abu A'la al-, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1993.
- , *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1993.
- Mansur, Ali, "Pemilihan Presiden secara Langsung " *Jawa Pos*, Kamis 6 Juli 2000.

- Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Musa, Yussuf & Nizham, *Politik dan Negara dalam Islam*. Terj. M. Thalib, Surabaya : 1990.
- Nasyar Ali, Samy al- dan Ahmad Zaky 'Athiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa Firdaus, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Nawawi, Hadari, *Hakekat Manusia Menurut Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Rahmat, Jalaluddin, "*Islam di indonesia: Masalah Definisi*" dalam M. Amien Rais (ed), *Islam di Indonesia*, Cet, II Jakarta: Rajawali Press, Maret 1989
- Rais, M. Amien, *Sikap Kami*, Cet. I, Surabaya: Pustaka Anda, 1999.
- Rais, Dhiya ad-Din, *Islam dan Khilafah, Kritik terhadap buku khilafah dan pemerintahan dalam Islam*, Ali Abd.Razak.Cet I. Bandung: Pustaka, 1985
- Rajak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya : PT. Bina ilmu, 1996.
- Rasyid, Daud, *Islam dalam berbagai Dimensi*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Saefuddin, A.M., *Ijtihad Politik*, Cet. I Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Shiddieqy, M. Hasbi ash-, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, Jakarta. Bulan Bintang, 1969.
- Shihab, Quraish, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Hidup*, cet. ke-11, Bandung: Mizan, Maret 1998.
- Syafi'ie, Inu Kencana, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Syal, Abdul Hadi asy-, *Islam Membina Masyarakat Adil Makmur*, alih bahasa Anshari Umar Sitangal, Jakarta: Pustaka Dian, 1987.
- Syari'ati, Ali, *al-Ummah wa al-Imamah*, alih bahasa Muhammad Faishal Hassanuddin, cet. ke- 1, Jakarta: YAPI, 1990.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik*, Alih Bahasa Rafi' Munawar, cet. II, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

-----, *al-Ḥisbah fī al-Islām au Wadifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992 M.

-----, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah fī Iṣlāh al-Rā'ī wa ar-Ra'iyah*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1409 H/1988 M.

Wahjosumidjo, *kepemimpinan dan Motivasi*, cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Wirosardjono, Soejibto, *Dialog dengan Kekuasaan*, Cet. I Bandung Mizan, 1995.



Lampiran I

No	Hlm	Footnote	Terjemahan ayat
1	2		<p>BAB I</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu sekalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya</p>
2	7		<p>Apabila ada tiga orang mengadakan perjalanan, maka hendaklah salah seorang dari mereka diangkat menjadi pemimpin.</p>
3	13		<p>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu sekalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya</p>
4	14		<p>Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.</p>
5	15		<p>Apabila ada tiga orang mengadakan perjalanan, maka hendaklah salah seorang dari mereka diangkat menjadi pemimpin.</p>
6	59	57	<p>BAB II</p> <p>Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambilla ia sebagai orang yang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.</p>
7	62	63	<p>Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap</p>

			menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
8	76	18	<p>BAB III</p> <p>Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamudan mengerjaka amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.</p>
9	84		<p>BAB IV</p> <p>Apabila ada tiga orang mengadakan perjalanan, maka hendaklah salah seorang dari mereka diangkat menjadi pemimpin.</p>
10	92		<p>Bahwasanya Nabi Saw. Lewat di suatu kaum yang sedang menyetek biji kurma seraya beliau bersabda: seandainya kalian tidak melakukan hal itu (menyetek biji kurma) maka kalian akan mendapatkan biji yang keluar itu busuk/jelek, sambil berlalu, mereka berkata.</p>
11	95		<p>Apabila terdapat dua kemudaran maka harus di pilih yang lebih ringan risikonya.</p>

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

1. Abu A'la al- Maududi

Abu A'la al-Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad sebuah kota terkenal dikesultanan "Hyderabad" (Deccan) India, karier intelektualnya diawali dari kiprah jurnalisnya sebagai redaktur di harian Taj'jabalpur di tahun 1920. kemudian di tahun 1921-1923 menjadi pimpinan harian muslim, beliau kian gemar menulis dan mempublikasikan karya-karya revolusionernyasewaktu dua Negara anak Benua India dan Pakistan mulai didirikan pada Tahun 1974 dan mulai mulai merencanakan gerakan konstitusi islam dan jalan kehidupan Islam yang telah menyebabkan ia di tahan oleh pemerintah Pakistan dan meninggal pada tahun 1983.

2. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah (Taqiyyuddin bin Taimiyah) lahir pada tanggal 12 Rabiul awwal 661 H di Haran, ia dibesarkan di lingkungan yang taat pad ajaran agama Islam. Ia pindah ke Syam (Syria) bersama keluarganya ketika terjadi penyerbuan antar Tartar (Mongol) ke Harran, ia belajar pada madrasah Hambaliyah Syamsyah dan mengkaji doktrin-doktrin Madzhab Hambali.lalu ia belajar pada beberapa guru besar lainnya untuk mendalami berbagai disiplin ilmu Islam termasuk ilmu Filsafat, ia sangat mahir dalam bidang ilmu kebudayaan Arab dalam segala seginya: Sastra, Filsafat, Agama, Tarikh, Politik dan lain-lain. Ia meninggal di penjara Damascus pada 20 Dzulqaidah 728 H.

3. Munawwir Sjadzali

Munawwir Sjazali lahir di Klaten, 7 November 1925 setelah menamatkan sekolah menengah pertama atau tungi Islam "Mambaul Ulum" Solo selanjutnya menjadi guru di Ungaran, Semarang. Selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung antara Markas pertempuran Jawa tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam. Karirnya di Departemen Luar negeri di mulai sejak tahun 1950 ketika di tugaskan pada seksi arab tumur tengah. Di luar negeri menjalankan tugas berturut-turut di Washington Dc (1956-1959). Dan Kolombo (1963-1968). Kemudian menjabat sebgai Minister atau wakil Kepala perwakilan RI di India (1972-1974) dan selanjutnya di angkat Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar dan perserikatan Keamiran Arab (1976-1980). Tugas-tugas di dalam negeri yang perh dijabatnya adalah sebagai Kepala bagian Amirika Utara (1959-1963) Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan Deplu (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staff Ahli Menteri Luar Negeri, dan Derektur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri sejak 1980. sebgai pengajar pada Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Lampiran 3

CURI CUUM VITAE

Nama : RISNO
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep 1 April 1981
Alamat Asal : Jl. Asta Juwar Sari Rt/Rw. 04/06
Tanamerah Saronggi Sumemep Madura
Alamat Jogja : Jl. Timoho Gg. Genjah No. 586
Ngentak Sapen Yogyakarta

Nama Orang Tua:

Ayah : Misnabi
Ibu : Ummi
Alamat : Jl. Asta Juwar Sari Rt/Rw. 04/06
Tanamerah Saronggi Sumenep Madura

Pekerjaan Orang Tua:

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga/Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Ittihad Tanamerah Lulus Tahun 1994
2. MTs Ponpest Nurul Islam Lulus 1997
3. SMU Ponpest Nurul Islam Lulus 2000
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 2006

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Osisi MTSN Ponpest Nurul Islam
2. Pengurus Osisi SMU Ponpest Nurul Islam
3. Ketua Ikatan Keluarga Santri (IKSNI) Ponpest Nurul Islam
4. Pengurus Lingkar Studi Agama & Negara (Lesan) Yogyakarta
5. Pengurus HMI Komesariat Fak.Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Pengurus Cabang Institut Karate-DO (INKAI) Yogyakarta
7. Pengurus Persatuan Tenis Mija (PTM) UIN Yogyakarta

Yogyakarta, 24 Jumadil Ula 1427 H
01 Desember 2006 M

RISNO
01370889